

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERATAAN PENDIDIKAN BAGI ANAK MISKIN DI RA AL-AMIN, SUKOHARJO, NGAGLIK, SLEMAN

IMPLEMENTATION OF EDUCATION EQUITY POLICY FOR POOR CHILDREN IN AL-AMIN ISLAMIC KINDERGARTEN, SUKOHARJO, NGAGLIK, SLEMAN

Oleh: Hasna Yuridha Fatin, Universitas Negeri Yogyakarta
hasnayuridha.2018@student.uny.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan serta faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan pemerataan pendidikan bagi anak miskin di RA Al-Amin, Sukoharjo, Ngaglik, Sleman dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Subjek penelitiannya kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan orang tua. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana yang keabsahan datanya diuji dengan triangulasi teknik dan sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemerataan pendidikan bagi anak miskin RA Al-Amin dilatar belakangi oleh tingginya biaya TK/RA di Desa Sukoharjo dan ketidakmampuan orang tua membiayai sekolah anaknya. Adapun tujuannya untuk memperluas kesempatan anak miskin agar memperoleh pendidikan dan meringankan beban orang tua. Implementasi kebijakan didukung oleh sembilan program rutin serta komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Faktor pendukung kebijakan, meliputi komitmen, kemandirian, dan tabungan sekolah serta kualitas pelaksana dan proses pembelajaran. Sedangkan, faktor penghambatnya, yaitu stigma, dana, dan ketidaktertiban orang tua.

Kata kunci: implementasi kebijakan, kebijakan pendidikan, pemerataan pendidikan

Abstract

This study aims to describe the implementation of policies as well as factors supporting and inhibiting the implementation of educational equity policies for poor children in Al-Amin Islamic Kindergarten, Sukoharjo, Ngaglik, Sleman with descriptive qualitative approach. The subject of his research is the principal, deputy principal, and parents. Data collection techniques through interviews, observations, and documentation studies. Data analysis using interactive models Miles, Huberman, and Saldana data validity is tested by triangulation techniques and sources. The results showed that the implementation of the policy of equitable education for poor children in Al-Amin Islamic Kindergarten was motivated by the high cost of kindergarten in Sukoharjo Village and the inability of parents to pay for their children's school. The goal is to expand the opportunities for poor children to get an education and ease the burden on parents. Policy implementation is supported by nine routine programs as well as communications, resources, dispositions, and bureaucratic structures. Policy supporting factors, including commitment, independence, and school savings as well as the quality of the implementers and the learning process. Meanwhile, the inhibitory factors, namely stigma, funds, and parental disorderliness.

Keywords: policy implementation, education policy, equal distribution of education

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20/2003 pasal 5 dan 11

menjelaskan bahwa setiap individu berhak memperoleh pendidikan bermutu dan pemerintah berkewajiban dalam pembiayaan, penyediaan layanan, dan

menjamin terselenggaranya pendidikan bermutu bagi seluruh kalangan masyarakat tanpa adanya diskriminasi. Amanat tersebut menjadi landasan hukum bahwa seluruh masyarakat dari berbagai latar belakang baik ekonomi, sosial, dan budaya memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan yang bermutu. Selain itu, pemerintah pusat maupun daerah memiliki kewajiban dan kewenangan untuk mewujudkan visi tersebut melalui peningkatan pemerataan pendidikan, yakni pemenuhan hak masyarakat dalam mengakses pendidikan sehingga tidak ada ketimpangan antara miskin dan kaya ataupun masyarakat kota dan desa (Hakim, 2016: 62).

Secara formal, pemerintah pusat dan daerah telah berusaha melaksanakan kebijakan pemerataan pendidikan pada sekolah dasar hingga sekolah menengah dengan mencanangkan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun (SD 6 tahun dan SLTP 3 Tahun) (Sari dan Asfar, 2021: 44). Kebijakan tersebut termuat dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20/2003 pasal 6 bahwa pendidikan dasar wajib diikuti oleh setiap individu yang berusia 7-15 tahun. Di samping jenjang pendidikan dasar terdapat pendidikan prasekolah, yaitu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang berkontribusi menyukseskan wajib belajar pendidikan

dasar yang pada akhirnya dapat tercapainya kemajuan pembangunan nasional.

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20/2003 pasal 1 menjelaskan bahwa penyelenggaraan PAUD ditujukan kepada anak sejak lahir hingga usia 6 tahun sebagai upaya pembinaan dengan cara memberikan rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani sehingga memiliki kesiapan memasuki pendidikan lebih lanjut. Suyadi (Balitbang Kemendikbud, 2017: 8) berpendapat bahwa tujuan penyelenggaraan PAUD, yaitu: 1) menyiapkan anak untuk memasuki pendidikan lebih lanjut; 2) menurunkan angka anak mengulang kelas, putus sekolah, dan buta huruf; 3) mempercepat tercapainya wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun; 4) terselamatkan dari keteledoran ibu sebagai wanita karier atau memiliki pendidikan rendah dalam mendidik anak; 5) meningkatkan mutu pendidikan; 6) memperbaiki kesehatan dan gizi anak; dan 7) meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Pentingnya keberadaan PAUD telah meningkatkan kesadaran orang tua untuk memanfaatkan layanan PAUD di daerahnya. Berdasarkan data Pusdatin Kemendikbud, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memiliki Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD tertinggi dibandingkan provinsi lainnya, yaitu sebanyak 69,91% (2019) dan 68,60%

(2020). Sedangkan, tahun 2021 menempati urutan kedua setelah Jawa Timur, yaitu sebanyak 63,26%. Khususnya Kabupaten Sleman memiliki APK PAUD yang cukup tinggi, sebagai berikut:

Tabel 1. APK PAUD Provinsi DIY

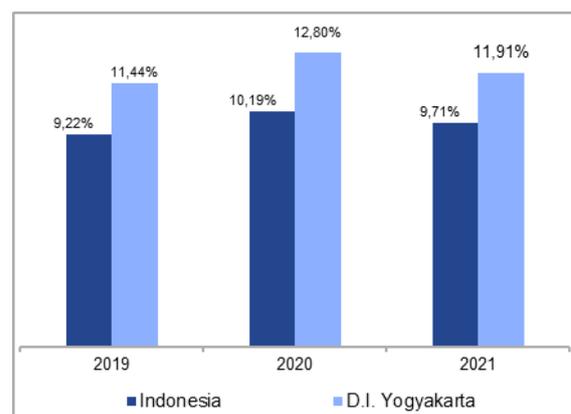
Kab/Kota	2019	2020	2021
Bantul	92,20%	87,62%	79,60%
Sleman	82,54%	82,64%	74,75%
Gunung Kidul	56,81%	55,40%	54,96%
Kulon Progo	54,55%	53,93%	51,97%
Kota Yogyakarta	55,84%	56,44%	47,29%

Sumber: Pusdatin Kemendikbud

Data di atas menunjukkan pada tahun 2021 terakhir masih ada sebanyak 13.458 (25,25%) anak usia dini di Kabupaten Sleman yang belum terlayani PAUD. Adapun salah satu faktor penyebabnya, yaitu faktor ekonomi (kemiskinan). Hasil penelitian dari Eka Widi Susanti, Adelina Hasyim, dan Yunisca Nurmalisa (2016) menunjukkan bahwa salah satu faktor utama orang tua enggan menyekolahkan anaknya di PAUD ialah karena faktor ekonomi, yaitu rendahnya pendapatan orang tua (kemiskinan) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan keluarga termasuk layanan pendidikan. Lebih lanjut, penelitian dari Zulkarnaen dan Ari Dwi Handoyo (2019) menjelaskan bahwa kondisi ekonomi masyarakat yang rendah (kemiskinan) menjadi salah satu penyebab

sulitnya mengakses layanan pendidikan yang berkualitas karena biaya pendidikan yang mahal. Kemiskinan menyebabkan sulitnya akses anak usia dini untuk memperoleh dukungan stimulus perkembangan di sektor pendidikan, kesehatan, tempat tinggal, maupun lingkungan yang pada akhirnya memunculkan berbagai masalah sosial seperti ketimpangan dan diskriminasi (Kresnawati dan Imelda, 2020: 227).

Permasalahan kemiskinan masih menjadi tantangan bagi Pemerintah Daerah Provinsi DIY. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DIY (2022) diketahui bahwa Provinsi DIY selama tiga tahun terakhir pada bulan September memiliki tingkat kemiskinan yang cukup tinggi, yakni di atas rata-rata angka kemiskinan nasional.



Gambar 1. Tingkat Kemiskinan Provinsi DIY

Sumber: BPS Provinsi DIY dan BPS Indonesia

Data BPS Provinsi DIY (2022) menunjukkan bahwa sektor pendidikan menjadi salah satu komoditi penyumbang

terbesar garis kemiskinan di Provinsi DIY baik di daerah perkotaan (2,03%) maupun pedesaan (1,06%). Data tersebut mengungkapkan bahwa untuk dapat mengakses pendidikan memerlukan biaya yang tidak sedikit. Adanya otonomi sekolah dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan memberikan peran untuk menentukan sendiri biaya pendidikan yang harus dipenuhi orang tua dan tak jarang sekolah menetapkan biaya yang tinggi untuk meningkatkan dan mempertahankan mutu sekolah (Hasbullah, 2015: 149). Akibatnya, akses masyarakat miskin terhadap pendidikan bermutu semakin terbatas. Masyarakat miskin akan semakin mengalami ketidakberdayaan, keterasingan, dan kekurangan (Sidik, 2019: 4).

Otonomi sekolah dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan termasuk untuk merumuskan dan mengimplementasikan suatu kebijakan di level sekolah sebagai upaya peningkatan kualitas pendidikan melalui optimalisasi sumber daya sekolah, termuat pada: 1) kebijakan desentralisasi pendidikan yang diatur dalam Undang-Undang No. 23/2014 mengenai Pemerintah Daerah; 2) kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 57/2021 pasal 27 mengenai Standar Nasional Pendidikan; dan 3) kuadran IV kebijakan publik diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi No. PER/04/M.PAN/4/2007 Tahun 2007 mengenai Pedoman Umum Formulasi, Implementasi, Evaluasi Kinerja dan Revisi Kebijakan Publik di Lingkungan Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah.

Adanya kebijakan di atas justru dimanfaatkan sekolah RA Al-Amin untuk menerapkan kebijakan pemerataan pendidikan bagi anak-anak miskin di Desa Sukoharjo. Kepala sekolah RA Al-Amin sekaligus sebagai *Assessor* Badan Akreditasi Nasional PAUD Provinsi DIY menyatakan bahwa RA Al-Amin merupakan sekolah formal yang memberikan layanan PAUD dengan biaya paling murah dan gratis dibandingkan dengan TK/RA lainnya di Desa Sukoharjo. Data Kecamatan Ngaglik menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Desa Sukoharjo masih cukup tinggi dibandingkan desa lainnya, yaitu pada tahun 2018 sebanyak 346 keluarga (1.141 jiwa), tahun 2019 sebanyak 335 keluarga (1.054 jiwa), tahun 2020 sebanyak 305 keluarga (1.021 jiwa), dan tahun 2021 sebanyak 355 keluarga (1.030 jiwa).

Kebijakan pemerataan pendidikan bagi anak miskin di RA Al-Amin telah dilaksanakan sejak berdirinya sekolah pada tahun 2010 hingga saat ini. Namun, belum diketahui secara jelas keberhasilan, hambatan, dan dampak dari kebijakan tersebut. Selain itu, belum adanya

penelitian mengenai implementasi kebijakan pemerataan pendidikan bagi anak miskin. Oleh karena itu, penelitian terbaru ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan serta faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan pemerataan pendidikan bagi anak miskin di RA Al-Amin, Sukoharjo, Ngaglik, Sleman.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk dapat memahami dan mendeskripsikan suatu fenomena yang alami (*natural setting*) secara terperinci dan mendalam (Nugrahani, 2014: 4) khususnya mengenai implementasi kebijakan serta faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan pemerataan pendidikan bagi anak miskin di RA Al-Amin. Data dan fakta yang diperoleh peneliti dideskripsikan dalam bentuk naratif yang kemudian diinterpretasikan (Setiawan dan Anggito, 2018: 11).

Waktu dan Tempat Penelitian

Lokasi penelitian di RA Al-Amin yang beralamat di Karanglo, Sukoharjo, Kec. Ngaglik, Kab. Sleman, DIY pada bulan Januari – Maret 2022. Adapun pertimbangannya dikarenakan RA Al-Amin merupakan jenjang PAUD yang menerapkan kebijakan pemerataan pendidikan bagi anak-anak miskin di Desa

Sukoharjo, yaitu memberikan layanan pendidikan gratis dan murah.

Target/Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini dipilih dan ditentukan dengan teknik *purposive sampling*, yakni berdasarkan tujuan dan pertimbangan karena dianggap paling mengetahui dan terlibat langsung dalam fenomena yang diteliti khususnya mengenai implementasi kebijakan pemerataan pendidikan bagi anak miskin di RA Al-Amin sehingga informasi yang diperoleh sesuai kebutuhan peneliti (Sugiyono, 2015: 219). Adapun subjek dalam penelitian ini, yaitu kepala sekolah dan wakil kepala sekolah sebagai agen pelaksana kebijakan serta 5 orang tua peserta didik sebagai kelompok sasaran kebijakan.

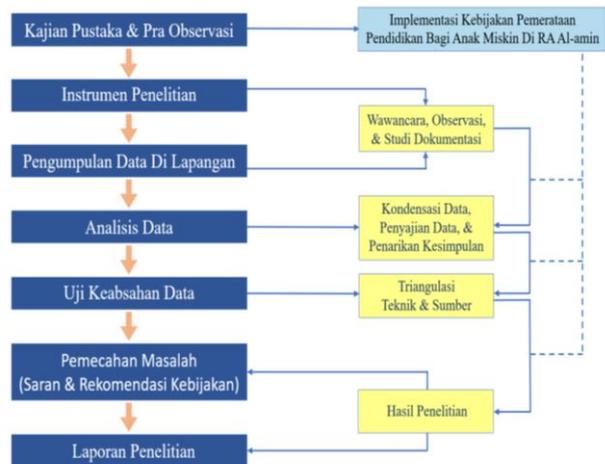
Prosedur

Prosedur penelitian terdiri dari 7 tahapan, yakni: 1) kajian pustaka dan pra observasi. Peneliti melakukan studi literatur mengenai kebijakan pendidikan, implementasi kebijakan pendidikan, pemerataan pendidikan, anak miskin, dan pendidikan anak usia dini. Sedangkan, pra observasi dilakukan untuk mengetahui dan mengidentifikasi permasalahan dan solusi RA Al-Amin sesuai fokus penelitian; 2) instrumen penelitian, sebagai pedoman pengumpulan data di lapangan yang disusun berdasarkan hasil kajian pustaka dan pra observasi, meliputi pedoman wawancara, observasi, dan studi

dokumentasi; 3) pengumpulan data, dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur kepada 7 informan (menggunakan pedoman wawancara dan dapat dikembangkan agar memperoleh informasi yang mendalam dan sesuai fokus penelitian), observasi partisipatif (melakukan pengamatan langsung dan turut serta dalam aktivitas subjek penelitian agar informasi yang diperoleh lengkap dan bermakna), dan studi dokumentasi (arsip/dokumen dan foto); 4) analisis data, untuk mengolah data hasil wawancara, observasi, dan studi dokumentasi dengan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana, meliputi kondensasi data (transkrip data hasil wawancara, observasi, dan studi dokumentasi yang kemudian dipilih dan disederhanakan sesuai fokus penelitian), penyajian data (hasil kondensasi data disajikan dalam bentuk naratif, bagan, dan tabel), dan penarikan kesimpulan (menginterpretasikan hasil analisis sesuai topik dan tujuan penelitian, pemecahan masalah, hasil analisis data, dan teori kajian pustaka); 5) uji keabsahan data, agar hasil analisis valid dan kredibel melalui triangulasi teknik (membandingkan hasil wawancara dengan hasil observasi dan studi dokumentasi) dan sumber (membandingkan hasil wawancara dengan topik yang sama dan narasumber yang berbeda); 6) pemecahan masalah, diperoleh dan dipertimbangkan berdasarkan hasil

penelitian berupa saran dan rekomendasi kebijakan yang ditujukan kepada *stakeholders* terkait; dan 7) laporan penelitian, hasil penelitian disajikan dalam bentuk laporan penelitian.

Prosedur penelitian yang dilakukan peneliti dapat ditunjukkan pada Gambar 2.



Gambar 2. Prosedur Penelitian

Data, Instrumen, dan Teknik Pengumpulan Data

Instrumen penelitian berguna sebagai pedoman dalam mengumpulkan data dan informasi agar sesuai dengan fokus yang dikaji. Adapun instrumen penelitian dalam penelitian ini, yaitu pedoman wawancara, observasi, dan studi dokumentasi (Siyoto dan Sodik, 2015: 66).

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara semi-terstruktur, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi berupa arsip/dokumen dan foto. Teknik tersebut digunakan peneliti agar data atau informasi yang diperoleh di lapangan dapat jelas,

mendalam, dan bermakna sesuai fokus penelitian.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2014: 8), yaitu proses analisis data yang dikerjakan secara interaktif dan berkelanjutan hingga dapat memperoleh data yang jenuh. Tahapan dalam analisis data model interaktif terdiri dari kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Adapun uji keabsahan data yang digunakan peneliti, yaitu uji kredibilitas dengan cara triangulasi teknik dan sumber (Sugiyono, 2015: 274). Triangulasi teknik dilakukan dengan cara membandingkan hasil wawancara dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan orang tua peserta didik RA Al-Amin dengan hasil observasi dan studi dokumentasi. Sedangkan, triangulasi sumber dilakukan melalui wawancara dengan topik yang sama kepada informan yang berbeda.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Kebijakan Pemerataan Pendidikan Bagi Anak Miskin Di RA Al-Amin

a. Latar Belakang Kebijakan

Rohman (2012: 86) menjelaskan bahwa latar belakang ditetapkannya kebijakan dikarenakan adanya

permasalahan, yaitu terjadinya kesenjangan antara harapan (*das sollen*) dengan kenyataan di lapangan (*das sein*). Kebijakan pemerataan pendidikan bagi anak miskin di RA Al-Amin dilatarbelakangi karena tingginya biaya pendidikan TK/RA di Desa Sukoharjo dan ketidakmampuan orang tua untuk membiayai sekolah anaknya karena faktor ekonomi (kemiskinan) sehingga akses anak usia dini untuk memperoleh layanan pendidikan menjadi sangat terbatas. Oleh karena itu, pihak pendiri sekolah, yakni kepala sekolah dan wakil kepala sekolah memutuskan untuk mengimplementasikan kebijakan ini dengan menetapkan biaya pendidikan murah dan memberikan subsidi pendidikan gratis. Hal tersebut sejalan dengan Arwildayanto, dkk (2018: 14) bahwa kebijakan pendidikan ialah keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah ataupun *stakeholders* lainnya di sektor pendidikan yang dilatarbelakangi permasalahan publik sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman dalam bertindak untuk mengatasi permasalahan tersebut.

b. Tujuan Kebijakan

Suwitri (2008: 6) menyebutkan bahwa salah satu aspek penting dalam kebijakan adalah memiliki tujuan yang ingin dicapai untuk kepentingan masyarakat. Tilaar dan Nugroho (2008: 140) menambahkan bahwa kebijakan pendidikan dirancang sebagai upaya

mencapai tujuan pendidikan dalam suatu masyarakat pada periode tertentu. Adapun tujuan RA Al-Amin menerapkan kebijakan pemerataan pendidikan bagi anak miskin sejak berdirinya sekolah hingga saat ini, yaitu untuk memperluas kesempatan anak khususnya anak miskin agar dapat merasakan fasilitas dan manfaat pendidikan sehingga mampu menyelesaikan studi dan melanjutkan pendidikan dasar, mengaplikasikan yang telah dipelajari dalam kehidupan sehari-hari, dan mengembangkan potensi diri serta meringankan beban orang tua yang mengalami keterbatasan ekonomi akan biaya pendidikan.

c. Program dan Kegiatan Pendukung Kebijakan

Nugroho (Arwildayanto, dkk, 2018: 78) menyampaikan bahwa tujuan dan sasaran kebijakan dapat tercapai dengan cara mengimplementasikannya baik secara langsung dalam bentuk program kegiatan ataupun melalui peraturan pelaksanaan yang ditafsirkan dari formulasi kebijakan secara konkret. Adapun program dan kegiatan rutin pendukung implementasi kebijakan pemerataan pendidikan bagi anak miskin di RA Al-Amin, meliputi:

1) Pendidikan Murah dan Pendidikan Gratis

Kehadiran RA Al-Amin dapat menjadi alternatif pilihan bagi para orang tua yang mengalami keterbatasan ekonomi

untuk menyekolahkan anaknya dengan biaya pendidikan murah dan tersedianya subsidi pendidikan gratis dibandingkan TK/RA lainnya di Desa Sukoharjo. Oleh karena itu, latar belakang sosial dan ekonomi bukanlah menjadi hambatan bagi setiap individu untuk mencapai keberhasilan dalam pendidikan (OECD, 2012: 15). Dalam hal ini, khususnya bagi anak-anak dari keluarga miskin.

Tabel 2. Program Pendidikan Murah dan Gratis di RA Al-Amin

Program	Syarat Pendaftaran	Keterangan	Pertimbangan
Pendidikan Murah	a. Akta Kelahiran Anak b. Kartu Keluarga	a. Biaya pendaftaran: Rp15.000,00 b. Biaya SPP: Rp35.000,00/bulan	Kondisi ekonomi orang tua: pekerjaan orang tua
Pendidikan Gratis		Pembebasan biaya pendaftaran dan SPP bulanan: a. Sejak awal pendaftaran sekolah b. Saat anak sudah menempuh pendidikan di RA Al-Amin	

2) Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)

KBM dilaksanakan setiap hari Senin hingga Sabtu dengan metode kelompok dan menggunakan kurikulum 2013. Adapun kegiatan dalam KBM di RA Al-Amin, yaitu sebagai berikut:

Tabel 3. KBM di RA Al-Amin

Kegiatan	Keterangan
Sebelum KBM	Berdoa bersama dan hafalan (doa sehari-hari, surat pendek, Hadist, dan Asmaul Husna)
Kegiatan Awal	Bernyanyi dan menari sambil menyapa anak-anak
Kegiatan Inti	Literasi cerita dan belajar sambil bermain sesuai tema pembelajaran
Kegiatan Akhir	Salat Dhuha berjamaah dan berdoa bersama

3) Ekstrakurikuler

Adapun kegiatan ekstrakurikuler di RA Al-Amin, sebagai berikut:

Tabel 4. Kegiatan Ekstrakurikuler di RA Al-Amin

Kegiatan	Sasaran	Pelaksanaan	Tujuan
Renang	Kelas A dan B	<i>Outing class</i> 2 bulan sekali	Pengenalan dan melatih kegiatan olahraga
Baca Iqro	Kelas A dan B	Setiap hari sebelum KBM secara bertahap	Meningkatkan kesiapan anak untuk memasuki pendidikan lebih lanjut dan prestasi belajar.
Latihan Membaca	Kelas B		

Ekstrakurikuler baca Iqro dan latihan membaca ini diselenggarakan karena salah satu syarat untuk memasuki sekolah SD/MI adalah tes kemampuan anak berupa membaca, menulis, dan berhitung. Ekstrakurikuler ini sebagai realisasi dari tujuan penyelenggaraan PAUD sebagaimana disebutkan Suyadi (Balitbang Kemendikbud, 2017: 8), yaitu menyiapkan anak untuk memasuki pendidikan lebih lanjut dan meningkatkan mutu pendidikan. Sedangkan, ekstrakurikuler renang sebagai realisasi dari tujuan penyelenggaraan PAUD, yakni sarana pengembangan potensi anak pada aspek motorik (Direktorat PGTK PAUD dan Dikmas, 2019: 9).

4) Makan Bersama

Makan bersama dilakukan secara rutin setiap hari Sabtu setelah KBM selesai dengan melibatkan peserta didik maupun

guru yang bertujuan untuk pengenalan dan pembiasaan makanan sehat, menumbuhkan kemampuan bersosialisasi, dan mengajarkan saling berbagi kepada anak-anak. Hal tersebut sesuai dengan tujuan penyelenggaraan PAUD, yakni sebagai sarana pengembangan potensi anak pada aspek sosial-emosional agar berperilaku baik (Direktorat PGTK PAUD dan Dikmas, 2019: 9).

5) Pengukuran Berat Badan (BB), Tinggi Badan (TB), dan Lingkar Kepala (LK)

Program ini merupakan program kemitraan yang dijalin RA Al-Amin dengan Puskesmas Ngaglik II di bidang kesehatan yang bertujuan untuk mendeteksi pertumbuhan dan perkembangan anak serta mencegah *stunting* pada anak. Pihak puskesmas biasanya memberikan vitamin A dan C setiap 3 bulan sekali, obat cacing setiap 6 bulan sekali, dan vaksin serta memeriksa kesehatan gigi anak. Sementara itu, setiap bulanannya pihak sekolah wajib mendata dan melaporkan perkembangan anak, seperti BB, TB, dan LK kepada pihak puskesmas. Apabila anak mengalami hambatan ataupun gangguan pada tumbuh kembangnya maka dapat dirujuk langsung ke puskesmas secara gratis. Kegiatan tersebut sejalan dengan tujuan penyelenggaraan PAUD sebagaimana disampaikan Suyadi (Balitbang Kemendikbud, 2017: 8), yakni untuk memperbaiki kesehatan dan gizi anak.

6) *Fieldtrip/Rihlah*

Fieldtrip/rihlah merupakan program unggulan yang dilakukan secara *outing class* sesuai dengan tema pembelajaran untuk mendukung *learning by doing*. Program ini sebagai upaya RA Al-Amin agar anak-anak mampu mengenali, memahami, dan memperdalam pengetahuan sesuai tema pembelajaran yang telah dipelajari secara konkret dan praktik dengan mengaitkan aspek kognitif, sosial-emosional, dan motorik. Program ini merupakan realisasi dari tujuan penyelenggaraan PAUD, yakni sebagai sarana pengembangan potensi anak secara kognitif, sosial-emosional, dan motorik serta agar anak memiliki pengetahuan dan kecakapan dasar sesuai kebutuhan dan tingkat perkembangannya (Direktorat PGTK PAUD dan Dikmas, 2019: 9).

7) *Outbond*

Outbond merupakan program *outing class* yang dilaksanakan setiap satu tahun sekali dengan melibatkan seluruh warga sekolah RA Al-Amin, yaitu guru, peserta didik, dan orang tua sebagai sarana rekreasi dan edukasi serta untuk menjalin hubungan baik dengan para orang tua. Namun, orang tua tidak diwajibkan mengikuti kegiatan ini karena pihak sekolah memaklumi kesibukan dan kondisi orang tua.

8) Latihan Manasik Haji

Latihan manasik haji merupakan program pendukung sekolah berbasis Islam

yang diikuti oleh peserta didik kelas A maupun kelas B. Program ini dilaksanakan setiap satu tahun sekali dengan tujuan untuk pengenalan tata cara dalam kegiatan agama Islam kepada anak-anak sejak dini. Dapat dikatakan, program ini sebagai sarana pengembangan potensi anak pada aspek agama (Direktorat PGTK PAUD dan Dikmas, 2019: 9).

9) Porseni Anak

Porseni anak merupakan ajang kreativitas anak RA yang diikuti peserta didik RA Al-Amin dalam bentuk kegiatan perlombaan baik diselenggarakan di tingkat kecamatan, kabupaten, ataupun provinsi. Dari berbagai perlombaan tersebut, RA Al-Amin mampu berprestasi dengan meraih kemenangan baik perlombaan di tingkat kecamatan, kabupaten, maupun provinsi.

Dari berbagai program dan kegiatan di atas, dapat dikatakan bahwa RA Al-Amin mampu memberikan kesempatan yang sama kepada anak-anak usia dini di lingkungan sekitar RA Al-Amin untuk dapat mendaftar sekolah serta kemudahan pada proses pendaftarannya. Hal tersebut terlihat dari ditetapkannya biaya pendidikan murah dan tersedianya subsidi pendidikan gratis serta tidak ada persyaratan khusus untuk pendaftarannya. Hasil temuan ini sesuai dengan konsep pemerataan pendidikan pasif oleh Coleman (Rosdiana dan Irwan, 2020: 7) bahwa pemerataan pasif ialah memberikan kesempatan yang

sama kepada anak-anak untuk dapat mendaftar sekolah.

Kendati demikian, RA Al-Amin juga menerapkan pemerataan pendidikan secara aktif. Coleman (Rosdiana dan Irwan, 2020: 7) menjelaskan bahwa pemerataan aktif, yaitu adanya kesamaan untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik agar mendapatkan hasil belajar yang optimal. Oleh karena itu, makna pemerataan aktif bukan hanya memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan melainkan setelah menjadi peserta didik harus diperlakukan sama dengan adil sehingga memperoleh pendidikan dan mampu mengembangkan potensi diri secara optimal. Hal tersebut terlihat dari RA Al-Amin yang memberikan fasilitas dan layanan PAUD secara merata dan optimal baik kepada anak yang mampu (membayar) maupun tidak mampu (tidak membayar) secara ekonomi agar anak-anak mampu menyelesaikan studi dan melanjutkan pendidikan dasar, mengaplikasikan yang telah dipelajari dalam kehidupan sehari-hari, dan mengembangkan potensi diri.

d. Implementasi Kebijakan dengan

Model George C. Edward III

1) Komunikasi

Edward III (Arwildayanto, dkk, 2018: 93) berpendapat bahwa kebijakan pendidikan dapat terlaksana baik apabila terdapat komunikasi efektif antara

pelaksana kebijakan dengan kelompok sasaran sehingga tujuan dan sasaran dapat disosialisasikan dengan baik dan mencegah terjadinya distorsi (penyimpangan). Edward III (Yuliah, 2020: 139) mengemukakan tiga dimensi penting yang berpengaruh pada pelaksanaan kebijakan, sebagai berikut:

- a) Transmisi, yaitu proses penyampaian instruksi implementasi kebijakan. RA Al-Amin mengomunikasikan kebijakan ini kepada agen pelaksana secara diskusi internal sejak berdirinya sekolah di mana merupakan keputusan dan kesepakatan bersama antar pendiri sekolah, yakni kepala sekolah dan wakil kepala sekolah. Sedangkan, komunikasi kepada orang tua peserta didik sebagai kelompok sasaran dilakukan melalui sosialisasi secara personal saat pendaftaran sekolah ataupun saat anak sudah menempuh pendidikan di RA Al-Amin yang disesuaikan dengan kondisi ekonomi orang tua. Hal tersebut dilakukan agar tidak menimbulkan kecemburuan dan kesenjangan sosial di antara orang tua maupun peserta didik.
- b) Kejelasan, yaitu instruksi implementasi kebijakan harus disampaikan secara jelas agar pesan-pesan tersebut dapat diterima dan dipahami. Kebijakan pemerataan pendidikan bagi anak miskin di RA Al-Amin dapat dikomunikasikan secara jelas oleh agen pelaksana kepada orang tua peserta didik melalui sosialisasi

secara personal dengan cara bertatap muka langsung. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. PER/04/M.PAN/4/2007 Tahun 2007 mengenai Pedoman Umum Formulasi, Implementasi, Evaluasi Kinerja dan Revisi Kebijakan Publik di Lingkungan Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah bahwa suatu kebijakan yang diimplementasikan dapat disosialisasikan kepada publik (masyarakat) melalui temu publik. Adapun tujuan dari sosialisasi yang dilakukan RA Al-Amin tersebut, yaitu mengajak orang tua terutama penduduk sekitar yang tidak mampu secara ekonomi agar mau menyekolahkan anaknya di RA Al-Amin sehingga anak-anak miskin dapat memperoleh layanan PAUD.

c) Konsistensi, yaitu instruksi implementasi kebijakan harus jelas dan konsisten agar pelaksana kebijakan tidak kesulitan dalam menjalankan tanggung jawabnya dan meminimalisir terjadinya distorsi kebijakan. Kebijakan pemerataan pendidikan bagi anak miskin di RA Al-Amin dapat dikomunikasikan secara konsistensi yang terlihat dari pelaksanaannya, yakni sejak berdirinya sekolah hingga saat ini dengan menetapkan biaya pendidikan yang lebih

murah dan menyediakan subsidi pendidikan gratis dibandingkan sekolah lainnya di Desa Sukoharjo.

2) Sumber Daya

Edward III (Tahir, 2018: 87) berpendapat bahwa implementasi kebijakan akan berjalan efektif apabila didukung sumber daya yang memadai, yaitu sumber daya manusia, finansial, dan fasilitas.

a) Sumber Daya Manusia

Edward III (Tahir, 2018: 87) menjelaskan bahwa sumber daya manusia berkaitan dengan kuantitas ataupun kualitas (kecakapan, kompetensi, atau keterampilan) yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan. Agen pelaksana kebijakan pemerataan pendidikan bagi anak miskin di RA Al-Amin terdiri dari 3 pelaksana yang secara kualitas sudah memadai terlihat dari kemampuannya dalam mengajar didukung dengan bidang keahlian PAUD dan berpengalaman mengajar.

Tabel 5. Agen Pelaksana Kebijakan

No	Agan Pelaksana	Pendidikan
1	Kepala Sekolah	S1 Psikologi, S1 PG-PAUD, dan S2 PIAUD
2	Wakil Kepala Sekolah sekaligus Bendahara dan Guru Kelas B	S1 PG-PAUD
3	Sekretaris sekaligus Guru Kelas A	S1 PG-PAUD

Direktorat PGTK PAUD dan Dikmas (2019: 9) menyebutkan bahwa penyelenggaraan PAUD sebagai sarana

pengembangan potensi anak baik secara agama, kognitif, sosial-emosional, bahasa, dan motorik kasar dan halus serta berperan penting agar anak memiliki kemampuan dasar Aqidah sesuai agama yang diyakininya, berperilaku baik, pengetahuan dan kecakapan dasar, motivasi dan sikap belajar positif, dan mendukung kesuksesan belajar di sekolah dasar. Berbagai tujuan tersebut dapat dicapai RA Al-Amin yang ditunjukkan dari adanya perubahan positif pada kemampuan dan perilaku anak, sebagai berikut:

Tabel 6. Kemampuan dan Perilaku Peserta Didik RA Al-Amin

Aspek	Capaian
Agama dan Kemampuan Dasar Aqidah (Islam)	Menghafal doa-doa, surat pendek, Asmaul-Husna serta mengaji dan beribadah salat
Kognitif dan Bahasa	Membaca, menulis, berhitung, dan bercerita
Sosial-emosional	Bersosialisasi, berani, dan ceria
Kesuksesan Belajar di Sekolah Dasar	Kesiapan memasuki pendidikan dasar dan melanjutkan studi ke MI/SD serta berprestasi di sekolahnya

b) Sumber Daya Finansial

Edward III (Tahir, 2018: 87) menjelaskan bahwa sumber daya finansial berkaitan dengan dana operasional

kebijakan. Di RA Al-Amin, pendanaan untuk mengimplementasikan kebijakan ini dikelola dan dialokasikan secara subsidi silang yang dirincikan, sebagai berikut:

Tabel 7. Sumber Daya Finansial RA Al-Amin

Sumber Dana	Keterangan
BOP Kanwil Kemenag DIY	Rp300.000,00/anak per semester
Uang Pendaftaran Sekolah	Rp15.000,00/anak
SPP	Rp35.000,00/anak per bulan

c) Sumber Daya Fasilitas

Edward III (Tahir, 2018: 87) menyampaikan bahwa sumber daya fasilitas berkaitan dengan sarana dan prasarana. RA Al-Amin memiliki sarana dan prasarana yang terbilang sedikit namun cukup lengkap, yakni terdapat gedung sekolah, Alat Permainan Edukatif (APE) di dalam kelas maupun di taman bermain, halaman yang luas dan aman, perpustakaan, alat tulis, televisi, media pembelajaran video edukatif, dan masjid sebagai tempat ibadah. Meskipun sedikit, para guru mampu mengkreasikan media pembelajaran dengan kreatif sesuai ketersediaan sumber daya sekolah baik dari segi peralatan maupun keuangan agar proses pembelajaran berjalan optimal.

3) Disposisi

Edward III (Arwildayanto, dkk, 2018: 94) menjelaskan bahwa disposisi

merupakan sikap agen pelaksana kebijakan berkaitan dengan watak dan karakteristik, yakni harus berkomitmen, jujur, dan demokratis sehingga dapat tercapainya tujuan dan sasaran kebijakan. Agen pelaksana implementasikan kebijakan pemerataan pendidikan bagi anak miskin di RA Al-Amin memiliki disposisi yang baik, ditunjukkan pada:

- a) Komitmen, yakni terlaksananya kebijakan ini secara berkelanjutan sejak berdirinya sekolah hingga saat ini dengan memberikan subsidi pendidikan gratis dan menetapkan biaya pendidikan murah di setiap tahunnya. Selain itu, agen pelaksana selalu berusaha memberikan layanan pendidikan optimal agar anak-anak memiliki kesiapan memasuki pendidikan lebih lanjut.
- b) Kejujuran, yakni sikap dan kewenangan kepala sekolah dalam menetapkan biaya pendidikan murah agar pihak sekolah tidak mengambil keuntungan dari sisa-sisa dana yang tidak terpakai apabila program kegiatan sekolah tidak terlaksana.
- c) Demokratis, yakni sikap pelaksana dalam memberikan hak yang sama kepada anak-anak mampu maupun tidak mampu secara ekonomi untuk mendapatkan fasilitas dan layanan pendidikan optimal sehingga tidak terjadi kesenjangan sosial dan diskriminasi.

4) Struktur Birokrasi

Terdapat dua aspek penting dalam struktur birokrasi untuk mengimplementasikan kebijakan pemerataan pendidikan bagi anak miskin di RA Al-Amin, sebagai berikut:

a) Struktur Organisasi

Edward III (Arwildayanto, dkk, 2018: 95) mengungkapkan bahwa aspek penting pertama ialah mekanisme dan struktur organisasi pelaksana, yakni struktur organisasi harus dapat mempresentasikan pembagian tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan sehingga memudahkan koordinasi dan komunikasi antar unit-unit pelaksana dan mencegah terjadinya distorsi kebijakan.

Di RA Al-Amin, struktur organisasi melekat pada struktur organisasi sekolah yang memuat nama-nama beserta pembagian tugas dan tanggung jawab. Namun, yang berperan penuh adalah pihak internal sekolah karena kebijakan tersebut dirumuskan dan ditetapkan oleh pihak sekolah sendiri sehingga pelaksanaannya lebih efisien dan optimal terutama dalam pengelolaan keuangan sekolah secara mandiri. Hal tersebut sesuai pendapat Edward III (Subarsono, 2005: 92) bahwa panjangnya struktur organisasi akan mengakibatkan lemahnya pengawasan dan terjadinya *red-tape* (prosedur yang rumit dan kompleks) sehingga aktivitas

organisasi menjadi tidak efektif dan fleksibel.

b) Pedoman Pembagian Tugas

Edward III (Arwildayanto, dkk, 2018: 95) mengemukakan bahwa aspek kedua ialah mekanisme pelaksanaan program yang termuat dalam SOP (prosedur operasional yang standar) untuk dijadikan sebagai pedoman dalam bertindak sehingga kerangka kerja harus jelas, sistematis, dan mudah dipahami.

Di RA Al-Amin, pedoman yang digunakan agen pelaksana untuk mengetahui dan menjalankan pembagian tugas dan perannya disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing yang dijabarkan dalam dokumen pembagian tugas guru dan tenaga kependidikan RA Al-Amin. Dalam hal ini, kepala sekolah sebagai penanggung jawab penuh dalam penyusunan, pengoordinasian, pengelolaan, pembinaan, dan pengarahan pada program dan kegiatan sekolah termasuk untuk mendukung implementasi kebijakan ini.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Pemerataan Pendidikan Bagi Anak Miskin Di RA Al-Amin

a. Faktor Pendukung

Rohman (2012: 115) berpendapat bahwa personil pelaksana menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan, yakni berkaitan dengan tingkat

pendidikan, pengalaman, motivasi, komitmen, kesetiaan, kinerja, kepercayaan diri, perilaku, dan kemampuan kerja sama. Dalam hal ini, pelaksana kebijakan menjadi faktor pendukung implementasi kebijakan pemerataan pendidikan bagi anak miskin di RA Al-Amin, yakni pertama, keyakinan dan komitmen sekolah dalam melaksanakan kebijakan ini secara berkelanjutan dengan menetapkan biaya pendidikan murah dan memberikan subsidi pendidikan gratis di setiap tahunnya. Kedua, guru berkompeten di bidang keahlian PAUD dengan kualifikasi akademik PG-PAUD yang tergabung dan aktif dalam kegiatan IGRA dan PGRI.

Faktor ketiga ialah sedikitnya jumlah peserta didik berdampak positif terhadap proses belajar mengajar sehingga lebih intensif, kondusif, dan optimal. Faktor tersebut sebagaimana disampaikan Ali Imron (Hasbullah, 2015: 105) bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh dukungan kelompok sasaran terhadap pelaksanaan kebijakan dan ketersediaan sumber potensial.

Faktor berikutnya berkaitan dengan birokrasi. Ali Imron (Hasbullah, 2015: 105) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh faktor efektivitas dan efisiensi birokrasi. Dalam hal ini, RA Al-Amin mengelola keuangan sekolah secara mandiri dan independen sehingga pemanfaatan dan

pengalokasiannya lebih efisien dan optimal untuk pengembangan sekolah, subsidi silang, gaji guru, dan peningkatan kompetensi guru.

Faktor kelima, adanya tabungan rutin peserta didik mempermudah guru untuk memantau kemampuan ekonomi orang tua. Sedangkan, bagi orang tua untuk mencicil pembayaran SPP dan kegiatan sekolah. Tabungan rutin tersebut dapat menjadi alternatif untuk mengatasi salah satu kendala dalam melaksanakan kebijakan ini, yaitu ketidaktertiban orang tua membayar SPP yang mengakibatkan terhambatnya subsidi silang untuk penggajian guru. Sebagaimana pendapat Ali Imron (Hasbullah, 2015: 105) bahwa implementasi kebijakan juga dipengaruhi oleh alternatif kebijakan untuk mengatasi permasalahan.

b. Faktor Penghambat

Faktor pertama, stigma masyarakat sekitar terhadap RA Al-Amin yang tidak mampu memberikan layanan pendidikan bermutu dikarenakan biaya pendidikan lebih murah dibandingkan sekolah lainnya serta lokasinya berada di dalam desa dan berdekatan dengan TK-TK ternama sehingga RA Al-Amin menjadi sepi peminat. Hal tersebut sesuai pendapat Van Meter dan Van Horn (Subarsono, 2005: 99) bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh sifat opini

publik di lingkungan dilaksanakannya kebijakan.

Kedua, sedikitnya jumlah peserta didik berdampak pada sedikitnya dana BOP yang diperoleh RA Al-Amin dikarenakan alokasi dana BOP dari Kanwil Kemenag DIY disesuaikan dengan jumlah peserta didik. Sebagaimana dikemukakan Hood dan Gunn (Tachjan, 2006: 41) bahwa syarat kebijakan dapat diimplementasikan secara sempurna adalah ketersediaan sumber-sumber yang memadai, yaitu salah satunya sumber daya finansial.

Ketiga, ketidaktertiban orang tua membayar SPP mengakibatkan terhambatnya subsidi silang pada penggajian guru. Ali Imron (Hasbullah, 2015: 105) berpendapat bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh dukungan kelompok sasaran dalam hal ini orang tua peserta didik yang berkaitan dengan dana finansial.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Implementasi Kebijakan Pemerataan Pendidikan Bagi Anak Miskin Di RA Al-Amin

a. Kebijakan ini dilatarbelakangi karena tingginya biaya pendidikan TK/RA di Desa Sukoharjo dan ketidakmampuan orang tua membiayai sekolah anaknya karena faktor ekonomi (kemiskinan).

- b. Tujuan kebijakan ini, yaitu memperluas kesempatan anak khususnya anak miskin agar memperoleh pendidikan optimal serta meringankan beban orang tua yang mengalami keterbatasan ekonomi akan biaya pendidikan.
- c. Program rutin pendukung kebijakan, meliputi: pendidikan murah dan gratis, KBM, ekstrakurikuler, makan bersama, pengukuran BB, TB, dan LK, *fieldtrip*/rihlah, *outbond*, latihan manasik haji, dan porseni anak.
- d. Kebijakan ini didukung oleh:
 - 1) Komunikasi, meliputi: a) transmisi, yaitu kebijakan ini dikomunikasikan secara diskusi internal kepada agen pelaksana. Sedangkan, komunikasi kepada orang tua peserta didik dilakukan melalui sosialisasi secara personal; b) kebijakan ini dikomunikasikan secara jelas melalui sosialisasi personal dengan bertatap muka langsung; dan c) kebijakan ini dikomunikasikan secara konsistensi terlihat dari pelaksanaannya hingga saat ini.
 - 2) Sumber daya, meliputi: a) sumber daya manusia terdiri dari 3 agen pelaksana yang secara kualitas sudah memadai; b) sumber daya finansial berasal dari BOP Kanwil Kemenag DIY, uang pendaftaran sekolah, dan SPP bulanan; dan c) sumber daya fasilitas cukup memadai didukung dengan kreasi media pembelajaran oleh guru.
 - 3) Disposisi, meliputi: a) komitmen: pelaksanaan kebijakan secara berkelanjutan dan usaha agen pelaksana dalam memberikan pendidikan optimal; b) kejujuran: sikap dan kewenangan kepala sekolah dalam menetapkan biaya pendidikan murah agar tidak dapat mengambil keuntungan dari sisa-sisa dana yang tidak terpakai; dan c) demokratis: sikap pelaksana dalam memberikan hak pendidikan yang sama kepada anak-anak.
 - 4) Struktur Birokrasi, meliputi: a) struktur organisasi melekat pada struktur organisasi sekolah; dan b) pedoman pembagian tugas agen pelaksana disesuaikan tupoksi masing-masing yang termuat dalam dokumen pembagian tugas guru dan tenaga kependidikan RA Al-Amin.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Pemerataan Pendidikan Bagi Anak Miskin Di RA Al-Amin

- a. Faktor pendukung kebijakan, meliputi:
 - 1) Keyakinan dan komitmen sekolah;
 - 2) Guru berkompeten;
 - 3) Kemudahan dalam proses pembelajaran;
 - 4) pengelolaan keuangan sekolah secara mandiri; dan
 - 5) pemanfaatan tabungan sekolah.
- b. Faktor penghambat kebijakan, meliputi:
 - 1) stigma masyarakat sekitar terhadap RA Al-Amin;
 - 2) minimnya dana BOP;

dan 3) ketidaktertiban orang tua membayar SPP.

Saran

1. Bagi Penelitian Selanjutnya

- a. Lebih mendalami fenomena ini khususnya mengenai RA Al-Amin yang mampu memberikan layanan PAUD yang bermutu dengan prinsip pendidikan mudah, murah, dan gratis sehingga diharapkan hasil penelitian tersebut dapat menghilangkan stigma masyarakat sekitar terhadap RA Al-Amin.
- b. Menggabungkan teknik pengumpulan data kualitatif dengan kuantitatif untuk mengetahui peran dan implikasi keberadaan RA Al-Amin bagi masyarakat sekitar khususnya orang tua peserta didik RA Al-Amin.

2. Bagi RA Al-Amin

- a. Mensosialisasikan kebijakan pemerataan pendidikan secara menyeluruh khususnya kepada masyarakat sekitar.
- b. Menetapkan kelompok sasaran implementasi kebijakan pemerataan pendidikan bagi anak miskin secara jelas dan tepat agar tidak menimbulkan kecemburuan dan kesenjangan sosial.

Rekomendasi Kebijakan

1. Bagi RA Al-Amin

- a. Melibatkan peran aktif *stakeholders* lainnya khususnya Kepala Dukuh Karanglo untuk membangun kepercayaan dan meningkatkan minat masyarakat terhadap RA Al-Amin yang

mampu memberikan layanan PAUD secara optimal dengan biaya pendidikan yang lebih terjangkau dibandingkan sekolah lainnya sehingga masyarakat dapat mempercayakan anak-anaknya menempuh pendidikan di RA Al-Amin.

- b. Perlunya membentuk Surat Keputusan (SK) kepala sekolah yang berkaitan dengan implementasi kebijakan pemerataan pendidikan bagi anak miskin agar pelaksanaannya lebih terorganisir dan sistematis.

2. Bagi Orang Tua Peserta Didik RA Al-Amin

Diharapkan mampu berusaha menyisihkan uang untuk ditabung di sekolah secara rutin meskipun dengan nominal yang sedikit agar dapat digunakan untuk mencicil pembayaran SPP bulanan ataupun kegiatan sekolah sehingga lebih meringankan beban orang tua.

3. Bagi Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY

Lebih memperhatikan RA Al-Amin terutama berkaitan dengan BOP serta sarana dan prasarana sekolah agar pelaksanaan kebijakan pemerataan pendidikan bagi anak miskin di RA Al-Amin berjalan optimal dan menyeluruh sehingga mampu memperbanyak kapasitas penerima subsidi pendidikan gratis terutama bagi anak-anak usia dini dari kalangan keluarga miskin di Desa Sukoharjo.

DAFTAR PUSTAKA

- Arwildayanto., Sukung, A., & Sumar, W. T. (2018). *Analisis Kebijakan Pendidikan: Kajian Teoritis, Eksploratif, dan Aplikatif*. Bandung: CV Cendekia Press.
- Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2017). *Model Pendidikan Anak Usia Dini Satu Tahun Sebelum Sekolah Dasar: Kajian Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal, dan Pendidikan Masyarakat*. Jakarta: Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Balitbang, Kemendikbud.
- Badan Pusat Statistik. *Persentase Penduduk Miskin (P0) Menurut Provinsi dan Daerah*. Diunduh pada tanggal 5 Februari 2022, dari https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data/0000/data/192/sdgs_10/1
- Badan Pusat Statistik Provinsi D.I. Yogyakarta. (2022). *Profil Kemiskinan D.I. Yogyakarta September 2021*. Diunduh pada tanggal 5 Februari 2022, dari <https://yogyakarta.bps.go.id/pressrelease/2022/01/17/1237/profil-kemiskinan-d-i--yogyakarta-september-2021.html>
- Direktorat Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat. (2019). *Konsep Dasar PAUD*. Jakarta: Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
- Hakim, L. (2016). *Pemerataan Akses Pendidikan Bagi Rakyat Sesuai dengan Amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 2(1).
- Hasbullah, M. (2015). *Kebijakan Pendidikan: Dalam Perspektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2007). *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/04/M.PAN/4/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Formulasi, Implementasi, Evaluasi Kinerja dan Revisi Kebijakan Publik di Lingkungan Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah*.
- Kresnawati, K., & Imelda, J. D. (2020). *Perlindungan Sosial bagi Anak Usia Dini pada Keluarga yang Rentan Sosial*. *Sosio Informa*, 6(3), 223-238.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Sage.
- Nugrahani, F. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Surakarta: Cakra Books.
- OECD. (2012). *Equity and Quality in Education: Supporting Disadvantaged Students and Schools*. OECD Publishing. <http://dx.doi.org/10.1787/9789264130852-en>
- Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan. (2019). *APK PAUD: Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2018/2019*. Jakarta: Pusat Data dan Statistik

- Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Pusat Data dan Teknologi Informasi. (2020). *APK PAUD: Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia Dini 2019/2020*. Jakarta: Pusat Data dan Teknologi Informasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Pusat Data dan Teknologi Informasi. (2021). *APK/APM PAUD, SD, SMP, dan SM Tahun 2020/2021 (Termasuk Madrasah dan Sederajat)*. Jakarta: Pusat Data dan Teknologi Informasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Rohman, A. (2012). *Kebijakan Pendidikan: Analisis Dinamika Formulasi dan Implementasi*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Rosdiana., & Irwan, M. (2020). *Kapita Selekta Pendidikan Nonformal*. Madiun: CV. Bayfa Cendekia Indonesia.
- Sari, M., Musdalifah, S., & Asfar, E. A. (2021). Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar Dalam Upaya Pemerataan Pendidikan di MTSN 1 Watampone. *Jurnal Mappesona*, 4(1).
- Setiawan, J., & Anggito, A. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak.
- Sidik, F. (2019). Kemiskinan dan Pembangunan Sektor Pendidikan di Kabupaten Ngawi: Merumuskan Isu Strategis. *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi*, 7(2).
- Siyoto, S., & Sodik, A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Sleman: Literasi Media Publishing.
- Subarsono, AG. (2005). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Susanti, E. W., Hasyim, A., & Nurmalisa, Y. (2016). Faktor Penyebab Orang Tua Tidak Menyekolahkan Anaknya di PAUD Fajar. *Jurnal Kultur Demokrasi*, 4(5).
- Suwitri, S. (2008). *Konsep Dasar Kebijakan Publik*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang.
- Tachjan, H. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIP) Bandung.
- Tahir, A. (2018). *Kebijakan Publik dan Good Governancy*.
- Tilaar, H. A. R., & Nugroho, R. (2008). *Kebijakan Pendidikan: Pengantar untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan sebagai Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Yuliah, E. (2020). Implementasi Kebijakan Pendidikan *The Implementation of Educational Policies*.
- Zulkaenaen., & Handoyo, A. D. (2019). Faktor-Faktor Penyebab Pendidikan Tidak Merata Di Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional*.